



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2018

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Beberapa inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pembuatan aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi PPID berbasis android sudah dapat diunduh dengan mudah di play store. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018	8
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2018	15
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2018	18
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2018	20
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	22
Dokumentasi Kegiatan PPID	24



BAB I

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Jawa tengah

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

GAJAH PURNOMO, S.H. M.P.
(Gubernur Jawa Tengah
(Pangegang Jawsa))

N. TAU KASIN HADIRIN
(Wakil Gubernur Jawa Tengah
(Pangarah))

Dr. N. SRI PUTUNGO KARTO SUDARNO, M.P.
Sekretaris Daerah
Majelis Permusyawaratan
Provinsi (Dan Dewanmuktat)

GAJAH SOWARTO, S.H. M.P.
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
(PPID Utamakarya)

S. ARIF KOSUMATO, M.S.
Kepala Bidang Statistik Data Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
(Sekretaris)

BETJO RIHMAN, ATO, MM
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
(Wakil Sekretaris)

DEWAN PERTIMBANGAN PELAKSIAN INFORMASI

HERU SETIAHADI, S.H. M.S.
Asisten Pembinaan Dan Pengembangan Badan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dr. BUDI WIBROHO, MA
Asisten Administrasi Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah

PRILU ANGGOLO BUDI RAHARDJO, S.H. MA
Asisten (Eksekutif) Dan Pengembangan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah

BISWAL ARJONO, S.H. M.S.
Inspektur Permusyawaratan Jawa Tengah

SUMARNO, S.H. MM
Kepala Badan Pengkajian Keuangan Dan Asst
Daerah Provinsi Jawa Tengah

DEWAN A. PELAKSIAN INFORMASI

DEY SUPRIYANTO, ATO, S.H. MM
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
(Mutasi)

Dr. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.S.
Kepala Bidang E-Government pada Dinas
Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

SULALDI, SH
Kepala Bidang Pelayanan Publik Dan Informasi Publik
pada Bidang Statistik, Dinas Komunikasi Dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

N. SULHARMAN DWISATIRKO, M.S.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Pengelolaan Dan Pengembangan Daerah
(Mutasi)

ANINDO SISWALAT, ATO, MT
Kepala Bidang Kelengkapan Informasi Dan Komuni-
kasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah
(Anggutan)

N. ILUSKO BARRODIN, M.S.
Kepala Badan Statistik, Burekri Dan Infrastruktur
Materi Statistik pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

Dr. TAMP SUPRIYANTO, M.S.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Mutasi)

Dr. EYI KUSULTORNO, MM
Kepala Bidang Perantara Dan Komuni-
kasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

ENDO SRI DARWANTO, SH
Kepala Badan Statistik, Statistik Publik Muteri
HAM Badan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

Dr. BATNA DENALATI, MT
Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

RIYAN BUDI SARDONO, SH
Kepala Badan Riset Umum Dan Pengembangan Pada
Bidang Statistik Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
(Anggutan)

PPID -3

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah



Gambar 1.2
PPID Utama Prov.
Jateng menerima
Penghargaan
Badan Publik
Informatif Dalam
Rangka Monev
Keterbukaan
Informasi Publik
Tahun 2018

Tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 96,95 .

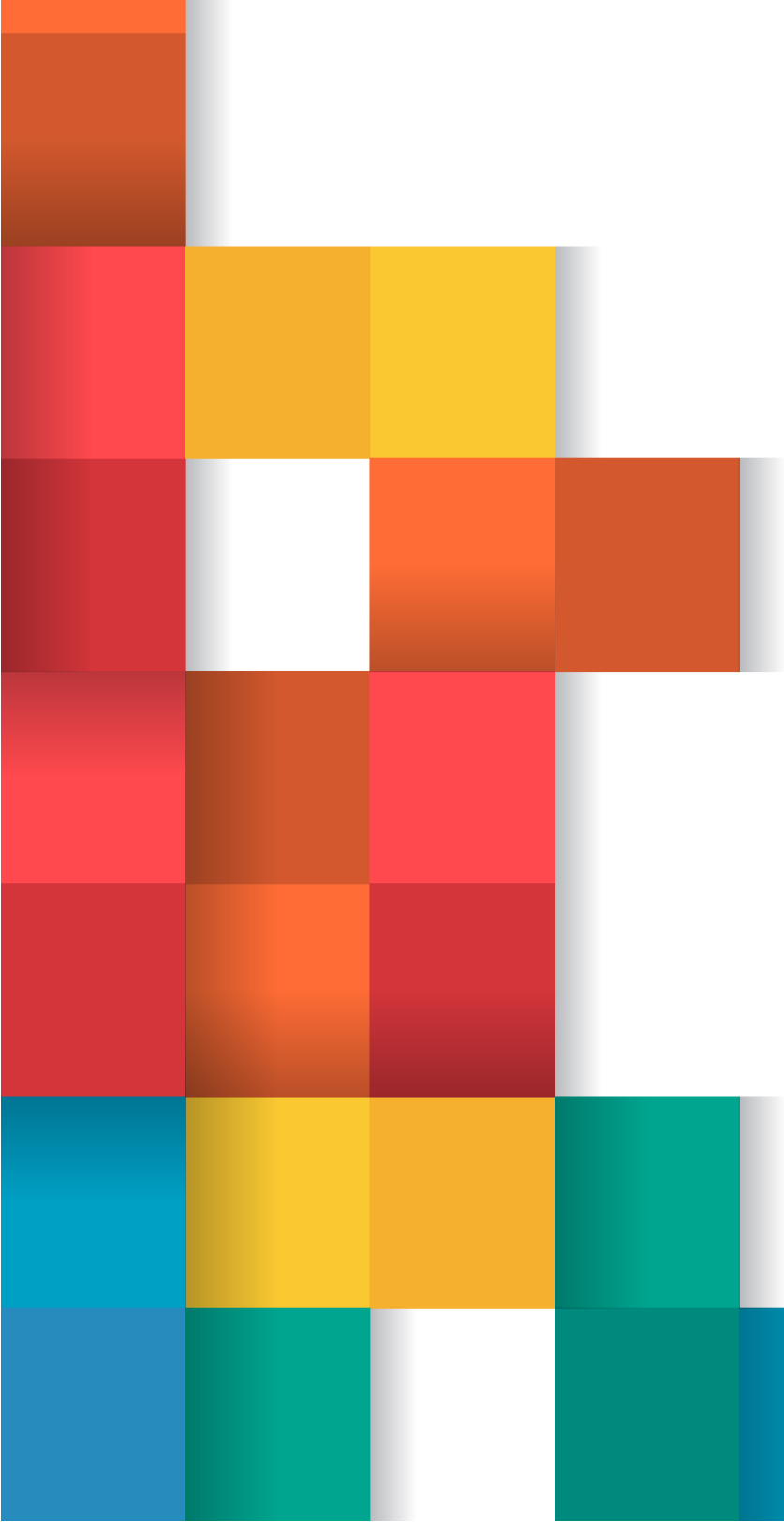


Tahun 2018 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 96.95.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II
Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2018

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>,

media sosial seperti Twitter, serta aplikasi *android* Jateng Slim.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno I/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas dimasing masing SKPD.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tak hanya pelayanan informasi publik dilakukan di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan-pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi PPID berbasis android dan pengenalan aplikasi tersebut diluncurkan pada pembukaan Pesta Rakyat yang digelar di Kabupaten Pemalang dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68, hari Sabtu 18 Agustus 2018, dan mendapatkan respon yang baik dari para tim juri penilai. Aplikasi tersebut sekarang bisa diunduh di Google Playstore



Gambar 2.1
Aplikasi Android
Jateng Slim sudah
tersedia di Google
Playstore

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum penguatan kelembagaan PPID serta selalu turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2018, pada tahun 2018 terdiri dari Sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Bimbingan Teknis PPID, Uji Konsekuensi, Rapat Koordinasi PPID Pembantu BUMD, Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

Gambar 2.2
Inforgrafis Dukungan
Anggaran PPID Pada
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah





BAB III

Rincian Pelaksanaan
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2018

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 meliputi :

1. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola PPID Berbasis Open Data” pada tanggal 25-26 April 2018 bertempat di Hotel Laras Asri Resort Salatiga dengan peserta 95 orang terdiri dari : PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah; PPID Pembantu BUMD Provinsi Jawa Tengah; dan PPID Utama Kab/Kota se Jawa Tengah;
2. Rapat Uji Konsekuensi pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, bertempat di Aula Lt. IV Diskominfo Prov. Jateng dengan

peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 100 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 41 SKPD, 12 BUMD dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta unsur-unsur PPID Utama;

3. Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema “Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan PPID” di Jawa Tengah pada tanggal 23-24 Agustus 2018 di Hotel Grand Wahid Salatiga dengan peserta 95 orang terdiri dari : PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah; PPID Pembantu BUMD Provinsi Jawa Tengah; dan PPID Utama Kab/Kota se Jawa Tengah;
4. Rakor Dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan PPID Se Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan peserta Peserta

kegiatan sebanyak 88 orang terdiri dari : PPID Utama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pembantu SKPD maupun BUMD telah menerima 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 6 hari kerja. Terdapat 21 (dua puluh satu) permohonan yang diarahkan, karena data / informasi tersebut belum dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD di Jawa Tengah.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2018

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		MASUK	DIPENUHI
1	Sekretariat Daerah Provisi Jawa Tengah	8	8
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	2	2
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	0	0
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	34	34
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	0	0
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah		
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	1331	1331
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah		
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	908	908
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	64	64
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	844	842
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	33	33
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	63	63
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	423	423
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	52	52
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	3	3
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	48	48
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	179	172
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	300	300
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	85	85
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	19	19
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	3	3
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	348	348
24	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	53	53
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	10	10
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	1067	1057
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	11	11
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	6	6
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9	9
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	22	22

31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	8	8
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	1	1
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	169	169
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	610	610
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	32	32
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	28	28
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	89	89
38	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	0	0
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	1445	1445
40	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	7	5
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	29	29
TOTAL		8343	8322

No	BUMD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		MASUK	DIPENUHI
1	PT. Sarana Pembangunan Jateng	1	1
2	JAMKRIDA	1	1
3	PT. Bank Jateng	6	6
4	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	0	0
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0	0
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK	0	0
7	PT. Trans Marga Jateng	0	0
8	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	0	0
9	PT. PRPP Jateng	80	80
10	PT. Sarana Patra Jateng	6	6
11	PT. Air Bersih Jateng	0	0
12	PT. Citra Mandiri Jateng	1	1
JUMLAH		95	95

Sumber Data : PPID Pembantu SKPD dan BUMD Prov. Jateng

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2018 ini, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 8.417 (delapan ribu empat ratus tujuh belas) pemohon informasi dari 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2018 mengabulkan 8.417 (delapan ribu empat ratus tujuh belas) pemohon informasi dari 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) permintaan informasi publik terdapat 21 permintaan informasi publik yang diarahkan karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang belum dikuasai.



BAB IV
Rincian Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
Tahun 2018

Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Tahun 2018

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2018 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 dua keberatan informasi yang diterima yakni dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum dan LBH Semarang.

Tabel 4
Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2012-2018

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan
2	2013		Informasi telah diteruskan ke
3	2014	1 (dari Mata Umat)	SKPD dan Dijawab
4	2015		Langsung oleh
5	2016	1 (dari PKN)	SKPD terkait
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
JUMLAH		4	

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2018 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah memberikan 2 (dua) tanggapan atas keberatan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2018 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak Sepanjang Tahun 2018 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak Sepanjang Tahun 2018 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243

Surat Elektronik : ppid@jatengprov.go.id; ppidutama.jateng@gmail.com Laman : [http:// ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id)

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	9	7	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	5	7	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	6	7	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	10	5	10	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	21	5	21	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	11	4	11	0	1	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	11	7	11	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	6	5	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	16	7	16	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	11	4	11	0	1	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	20	5	20	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	19	6	19	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		145	69	145	0	2	0	0	0	
RATA-RATA		12	6	12	0	0	0	0	0	

7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	17	3	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	908	1	908	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	43	3	43	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	109	5	91	13	10	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	229	3	226	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	60	8	60	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	411	2	408	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	5	5	4	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	3	7	2	1	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	74	1	74	0	0	0	0	0	TERPENUHI
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	179	6	172	7	0	0	0	0	TERPENUHI

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	66	10	66	0	0	0	0	0	TERPENUHI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	84	1	84	0	0	0	0	0	TERPENUHI
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	24	6	24	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	3	2	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	332	6	140	192	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	53	1	53	0	0	0	0	0	TERPENUHI
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	9	1	7	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	1067	1	1057	10	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	8	4	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	6	2	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	10	1	6	4	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

[illegible]

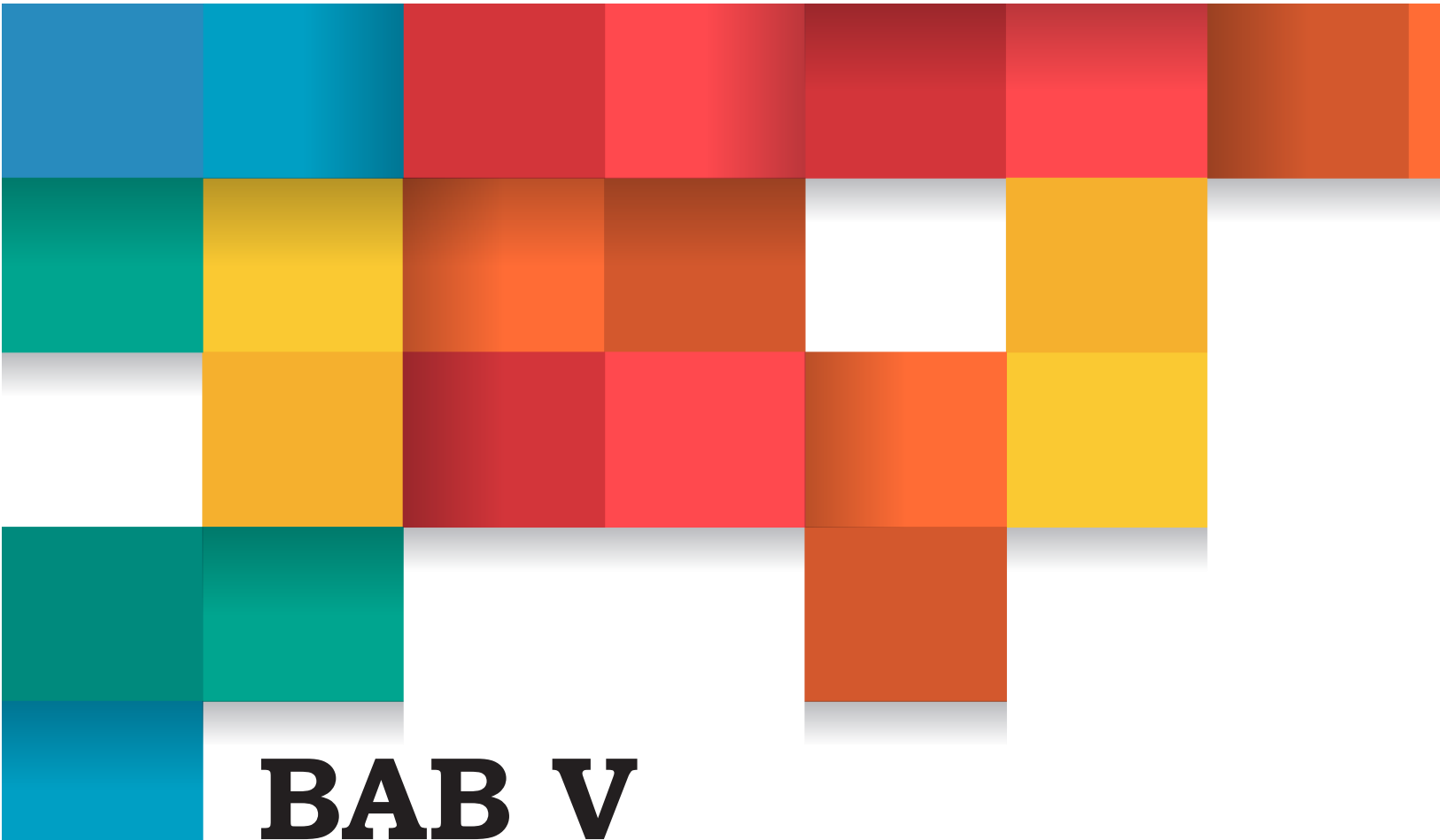
JUMLAH	6141	139	5889	247	13	0	0	0	
RATA-RATA	150	3	144	6	0	0	0	0	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : ppid@jatengprov.go.id; ppidutama.jateng@gmail.com Laman : [http:// ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id)

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	PT. Sarana Pembangunan Jateng	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT.JAMKRIDA	1	7	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	PT. Bank Jateng	6128	1	6128	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK	13049	7	12352	697	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	PT. Trans Marga Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	PT. PRPP Jateng	29	4	29	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	PT. Sarana Patra Jateng	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	PD. Air Bersih Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PD. Citra Mandiri Jateng	1	9	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		19221	30	18524	697	0	0	0	0	
RATA-RATA		1602	3	1544	58	0	0	0	0	



BAB V

Kendala Eksternal dan
Internal Dalam Pelaksanaan
Layanan informasi Publik Tahun
2018

Kendala Eksternal dan Internal

Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tahun 2018

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representatif;
4. Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal;
5. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.jatengprov.go.id , serta aplikasi Jateng Slim dan media sosial;
6. Respon PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

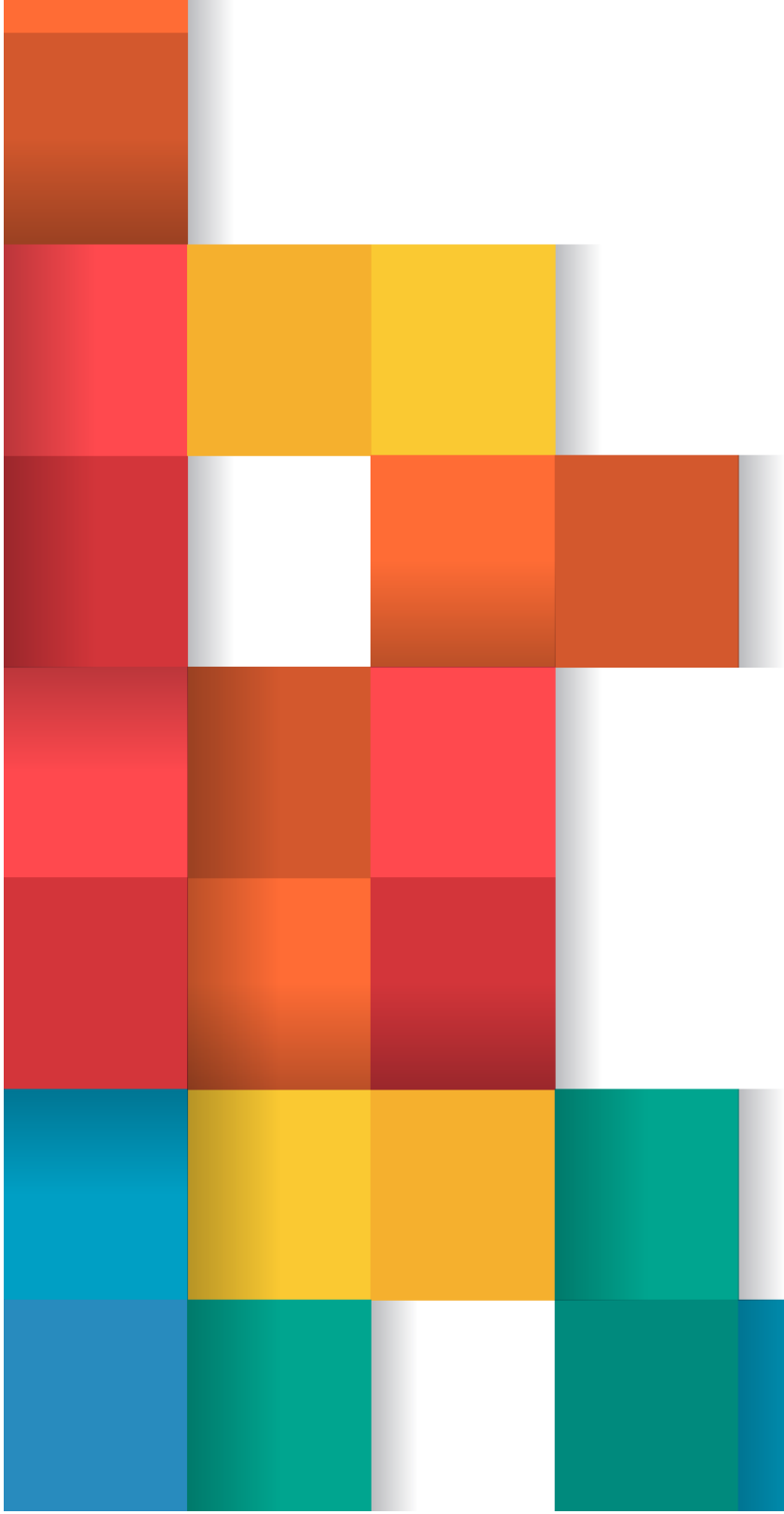
1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan *single data system* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang;
4. Mengajak PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
Selaku
ATASAN PPID UTAMA



SRI PURYONO KARTO SOEDARMO



Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

